

## DAFTAR PUSTAKA

- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 4(2), 190–205.
- Aldino, O., & Nasution, A. (2015). PENGARUH PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP PEGAWAI KANTOR UNIT PELAYANAN TERPADU VI DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN. *Perspektif*, 8, 506–512.
- Amri, P. (2015). Implementasi Pelayanan Samsat Corner dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Pajak. *Ilmu Pemerintahan Dan Kebijakan Publik*, 2.
- BAPENDA. (2014). SAMSAT Ciledug Cirebon. Retrieved from Visi Misi dan Gambaran Umum website: <https://bapenda.jabarprov.go.id/cabang-pelayanan-pendapatan-daerah-kabupaten-cirebon-ii-ciledug/>
- Basya, M. F., Hidayati, K., & Susanti, W. (2014). Analisis kontribusi pajak kendaraan bermotor roda dua terhadap pendapatan asli kota surabaya. *Fakultas Ekonomi*, 87–94.
- Dwiridotjahjono, J. (2010). Penerapan Good Corporate Governance: Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia. *Administrasi*, 5(2), 101–112.
- Edo, N. (2014). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT . PRATAMA PIONIR SENTOSA. *AGORA*, 2(2).
- Fatimah, Mardani, R. M., & Wahono, B. (2017). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Nilai Perusahaan dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *Riset Manajemen*, 51–69.
- Gusfahmi. (2011). Pajak Menurut Syariah. In *Perpustakaan Nasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hasan, N. I. (2018). Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam di Indonesia. *Islamadina*, 19(2), 75. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v19i2.2628>
- Hasannudin, & Wokas, H. R. . (2015). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara. *Riset Manajemen*.
- Huda, M. (2018). Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam. *Al-Intaj*, 4(1), 1–17.
- Juliardi, D. (2016). Model Good Corporate Governance dari Perspektif Syariah untuk Mengatasi Permasalahan Penerapan Corporate Governance di Indonesia. *Prosiding Seminars Competitive Advantage*, 29–39.
- Kaihatu, T. S. (2006). Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia. *Manajemen Dan Kewirausahaan*, 1, 1–9.
- Kamaroellah, R. A. (2015). KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) DI KABUPATEN. *Iqtishadia*, 2(1), 118–130.
- Kholis, N. (2016). *Perpajakan di Indonesia dalam persepektif Hukum Ekonomi Islam*. (c), 2–6.
- Mangala, A., & Mustamu, R. H. (2017). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN DI KOTA GRESIK. *AGORA*, 5(3).
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik. *Ilmu Politik Dan Komunikasi*, VI(1), 1–18.
- Mokoginta, N. C. (2015). Analisis Efektivitas Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan

- Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan PAD provinsi Sulawesi Utara. *EMBA*, 3(1), 685–694.
- Muin, F. (2014). OTONOMI DAERAH DALAM PERSEPEKTIF PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH-PEMERINTAH. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 69–79.
- Ningrum, R. (2010). *Refleksi Prinsip-Prinsip Keuangan Publik Islam Sebagai Kerangka Perumusan Kebijakan Fiskal Negara*. 86–103.
- Nursalim, M. (2014). OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN e-KTP GUNA MEMPERKOKOH KETAHANAN WILAYAH ( Studi Di Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilodong Kota Depok , Jawa Barat ). *Ketahanan Nasional*, 27–38.
- Pangalila, I. I., Ilat, V., & Runtu, T. (2015). Analisis Pelaksanaan Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Manado. *Analisis Pelaksanaan Sistem*, 3(1), 9–16.
- PPPD, T. T. U. (2018). *Sejarah Singkat Bapenda*.
- Prakoso, K. B. (2007). *Pajak dan Retribusi Daerah* (Revisi). Yogyakarta: UII Press.
- Priyono, H. (2014). *Pajak daerah dan retribusi daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah*.
- Qolbia, S. (2017). PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR SURYA SURABAYA. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5, 1–10.
- Rompis, N. E., Ilat, V., & Wangkar, A. (2015). TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA ( STUDI KASUS PADA SAMSAT AIRMADIDI ). *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(03), 51–62.
- Rosyada, A. H. (2017). *Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD provinsi Lampung tahun 2011-2015 dalam Perspektif Ekonomi Islam*.
- Sani, A., & Dewi, U. (2014). *Kinerja unit pelaksana program keluarga harapan dalam optimalisasi program keluarga harapan di kota yogyakarta*. 1–12.
- Sari, R. N., Al Musadieq, M., & Sulisty, M. C. W. (2018). ANALISIS IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT . PELABUHAN INDONESIA III ( PERSERO ). *Administrasi Bisnis*, 60(1), 90–99.
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitin Kuantitatif dan Kualitatif. 1*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (23rd ed.). Bandung: Alabeta.
- Suharto, U. (2004). *Keuangan Publik Islam: Reinterpretasi Zakat dan Pajak* (L. Fauroni, Ed.). Yogyakarta: Pusat Studi Zakat (PSZ).
- Sukamulja, S. (2016). GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI SEKTOR KEUANGAN : DAMPAK GCG TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN ( Kasus di Bursa Efek Jakarta ). *Benefit*, 8, 1–25.
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tulle, S., Sondakh, J. J., & Mawikere, L. M. (2018). Analisis Penerapan Prinsip Good Governance di Kantor Samsat Amurang. *Riset Akuntansi*, 13(3), 527–532.
- Utami, A. Y. U. T. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah*.
- Wulandari, N. (2010). GOVERNANCE TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA. *Fokus Ekonomi*, 1(2), 120–136.
- Yulianti, R. T. (2016). *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat*. Yogyakarta: Kaukaba.